

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Pribumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia sejak tahun 700 SM.

Meskipun aktifitas penambangan udah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif. Penambangan di Nusantara mulai dikembangkan secara massif menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia. Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing.¹

Pertambangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

¹ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 1-2

Wilayah Indonesia dikenal memiliki potensi pertambangan yang sangat besar di Dunia. Data pada akhir 2008 menunjukkan bahwa sumber daya batu bara mencapai 104.760 juta ton, emas sebesar 4.250 ton, tembaga sebesar 68.960 ribu ton, timah sebesar 650.135 ton dan nikel sebesar 1.878 juta ton. Penerimaan Negara langsung dari subsektor pertambangan umum pada tahun 2009 sekitar Rp51 triliun, yang terdiri atas penerimaan Negara bukan pajak lebih kurang Rp15 triliun, dan sisanya merupakan penerimaan Negara pajak. Investasi pertambangan tahun 2009 mencapai US\$1,8 miliar atau naik sebesar 9,5% dari angka tahun sebelumnya sebesar US\$1,6 miliar.²

Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat (3) disebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam Pasal tersebut tersirat dalam kekayaan alam salah satu diantaranya adalah bahan galian industri. Agar semua bahan galian tersebut di atas memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan penambangan bahan galian tidak terkecuali juga bahan galian industri akan mengubah keadaan lingkungan. Oleh karenanya semua kegiatan yang berkaitan wajib diusahakan secara benar dan memperhatikan keseimbangan alam yang dilaksanakan dengan sadar dan tidak perlu pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut seorang pengusaha bahan galian diwajibkan untuk memahami dan melaksanakan konsep-konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Resource Management*).

Untuk mewujudkan hal tersebut telah diatur perusahaan pertambangan bahan galian A dan B yang diatur dalam bentuk kuasa pertambangan (KP) sedang untuk bahan galian golongan C dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).³

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi

² Ibid Hal 57

³ Prof. Ir. Sukandarrumidi. 2004. *Bahan Galian industry*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal 11

untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasa industri. Industri merupakan salah satu sumber kemakmuran suatu bangsa, tetapi dapat pula menjadi sumber bencana. Sebagai sumber kemakmuran, keberadaannya harus di pertahankan bahkan kalau mungkin ditingkatkan. Namun sebagai bencana, dampak negatifnya harus direduksi seminimal mungkin, konsep ekologi industri menggunakan model pendekatan untuk menginteraksikan sistem industri dan sistem alam, sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan.⁴

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa, selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja, bagi Kota dan Kabupaten merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari Dinas dan Instansi terkait.⁵

Di Indonesia, dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakkan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus lagi di Indonesia, Pemerintah RI sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian

⁴ Ir. Philip Kristanto.2013. *Ekologi Industri*. Andi Publisher. Yogyakarta

⁵ YUDHISTIRA. Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi. pdf 15/3/2015. 4:21

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

- a. Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dan lain-lain.
- b. Bahan galian vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dan lain-lain.
- c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dan lain-lain.⁶

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, tepatnya penambangan pasir ini terjadi di Desa Keningar Kecamatan Dukun, Desa Keningar merupakan desa yang paling dekat dengan Gunung Merapi dieksploitasi sumber daya alamnya untuk diambil pasirnya, pasir yang dihasilkan oleh letusan gunung merapi merupakan bahan tambang yang menggiurkan bagi banyak orang, penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyewakan atau menjual tanah pertaniannya kepada pemilik modal untuk dijadikan lokasi penambangan pasir. Tanah pertanian yang semula merupakan lahan pertanian produktif dikeruk oleh alat-alat berat untuk diambil pasirnya dan meninggalkan lubang-lubang bekas penambangan, berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Nasional Universitas Gadjah Mada, penambangan pasir di kawasan Merapi telah terjadi kerusakan lingkungan seperti hutan dan jalan.

⁶ Ari Nurlitawati. *Penambangan Pasir Lereng Merapi*. 2015. Hal 1. Pdf 24/3/2015. 4:44

Kerusakan lingkungan terjadi pada kawasan penambangan Gunung Merapi meningkat seiring dengan semakin intensifnya penambangan dengan penggunaan alat-alat berat. Izin penambangan yang diberikan tidak disesuaikan dengan volume cadangan terukur. (Sudibyo, 2002) mengatakan penambangan pasir sudah memasuki lokasi yang tidak sesuai peruntukannya seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan hutan pinus milik perhutani. Penambangan yang dilakukan kekurangan lahan dan memperluas lokasi penambangan ke daerah yang dilarang oleh pemerintah seperti tanggul sungai, tanggul penahan lahar dan kawasan hutan lindung milik perhutani dan apabila penambangan batu dan pasir ini terus dilakukan maka dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial ekonomi. Dampak sosial ekonomi penyerapan tenaga kerja karena sebagian masyarakat bekerja menjadi tenaga kerja di penambangan pasir, adanya pemasukan bagi pemilik tanah yang dijual atau disewakan untuk diambil pasirnya dengan harga tinggi, banyaknya pendatang yang ikut menambang sehingga dapat menimbulkan konflik, adanya ketakutan sebagian masyarakat karena penambangan pasir yang berpotensi longsor.⁷

Pertambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak. Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi

⁷ YUDHISTIRA. *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Merapi*. pdf 15/3/2015. 4:21

secara legal (resmi) dan ilegal (penambangan yang liar). Padahal selama ini, penambangan galian golongan C cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang pertambangan batu dan pasir ilegal ?

C. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian, taraf ilmiah yang mengumpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian suatu masalah.

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran dalam melakukan penambangan batu dan pasir di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam mengurangi Penambangan Batu dan Pasir Ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis dapat memberikan kontribusi atau masukan yang realistis bagi penyelenggara pemerintahan (PEMKAB) Kabupaten Magelang apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sudah terlaksana dengan baik atau belum.

⁸ Ari Nurlitawati. *Penambangan Pasir Lereng Merapi*. 2015. Hal 5. Pdf 24/3/2015. 4:44

- b. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada dasarnya ilmu pemerintahan dalam perindustrian batu dan pasir.
- c. Bisa lebih mengembangkan pola pikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang diperoleh untuk meneliti lebih mendalam.

D. Kerangka Teori

Teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya.⁹

1. Evaluasi

Nugroho mengutip pendapat dari William N. Dunn, istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya”

⁹ Soerjono soekanto.1990.*Sosiologi Pengantar*.Rajawali pers. Jakarta Hal 30

menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati. Secara umum Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut¹⁰:

Tabel 1.1
Tipe Evaluasi Menurut Dunn

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ?	Unit pelayanan.
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio <i>cost benefit</i> .
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tetap. Efektifitas tetap.
4.	Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor Hicks, Kriteria Rawls.
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survei warga Negara.
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program Publik harus merata dan efisien.

Sumber: Buku. Dr. Riand Nugroho. *Public Policy*. 2009

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu *sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan*. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau sebagai evaluasi *sumatif*. Secara spesifik Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis.¹¹

Sebagai pembanding, James P. Lester dan Joseph Steward, Jr. Mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan atau

¹⁰ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta. Hal 536

¹¹ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 537

pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi *meta-evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.¹²

Adapun James Anderson membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Tipe *pertama*, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Kedua*, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. *Ketiga*, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.¹³

Edwar A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standardisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak¹⁴.

Evaluasi Kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu dari sisi akuntabilitasnya. Dengan evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan dirinya dalam konteks ketata-kelolaan yang baik. Pemahaman ini perlu dikembangkan karena hingga hari ini belum ada satu kebijakan pun yang

¹² Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 540

¹³ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541

¹⁴ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541

mencantumkan dalam dirinya kapan dan bagaimana kebijakan itu akan di-*evaluasi*, dan tidak ada kata dalam kebijakan publik yang mengatakan *dapat diganti setelah dilakukan evaluasi*.

Evaluasi Kebijakan, dengan demikian, perlu dilaksanakan secara memadai dari sisi dimensi kebijakan publik, untuk mendapatkan gambaran terbaik dimana terjadi kemajuan dan dimana ada kemandekan. Hal ini merupakan sisi *fairness* dalam *good governance*¹⁵.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah:

a. Ciri Evaluasi

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan, dan Kinerja kebijakan¹⁶.

b. Fungsi Evaluasi

1. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang

¹⁵ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 556

¹⁶ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 535-536

diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut¹⁷.

c. Tujuan Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa *dilepas begitu saja*. Kebijakan harus *diawasi*, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya. Sejauh mana *tujuan* dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”¹⁸.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pemerintah Daerah

Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik saja, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga

¹⁷ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 541-542

¹⁸ Dr. Riand Nugroho. 2009. *Public Policy*. PT Elek Media Komputindo. Jakarta Hal 535

komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. Kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar dengan merata di seluruh dunia.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Dalam bentuk yang ideal, pengelolaan sumber daya alam melalui otonomi daerah yang diterapkan dengan baik akan memberikan pengawasan demokratis terhadap proses pembentukan kebijakan, penegakan hukum yang efektif, pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Proses ini yang akan juga memberikan peluang penggunaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kepentingan seluruh masyarakat sekarang dan di masa yang akan datang¹⁹.

Hunker menyatakan bahwa sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer yang keberadaannya tergantung aktifitas manusia. Semua bagian lingkungan alam kita (biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai) adalah sumber daya alam. Bagaimana keberadaan sumber daya alam tersebut sangat tergantung pada

¹⁹ <https://azdidahlan.wordpress.com/2010/10/02/dinamika-pengelolaan-sumber-daya-alam-dalam-otonomi-daerah> 20/2/2016. pukul 9:52 wib

pilihan-pilihan bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh umat manusia. Biji, benih, pohon, air, udara, matahari, sungai, dikatakan sumber daya ketika kita mengetahui nilai guna. *They are the 'neutral stuff' that makes up the world, but they become resources when we find utility in them*²⁰.

Sumber daya mineral memiliki dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat karena sumber daya mineral memberikan harapan pada upaya pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan harapan hidup lebih baik. Disisi lain, industri pertambangan juga merupakan industri yang menimbulkan berbagai perubahan drastis terhadap lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya masyarakat. Pada kenyataannya, pencemaran lingkungan yang dilakukan industri pertambangan justru membuat masyarakat sekitar semakin miskin. Kesempatan masyarakat sekitar memanfaatkan lahan semakin kecil karena hutan-hutan telah dikonversi, sungai-sungai mengeruh, udara kotor, tanah tercemar limbah B3²¹.

Hotteling menawarkan kerangka untuk menentukan waktu paling tepat mengeluarkan sumber alam dari perut bumi. Teori ini sebagai basis dari ekstraksi sumber daya alam tidak pulih secara normal ataupun optimal. Prinsip model Hotelling adalah bagaimana mengekstrak sumber daya mineral secara optimal dengan kendala stok dan waktu. Implementasi dari teori bagi pihak perusahaan pertambangan adalah untuk mendapatkan produksi sumber daya mineral secara optimal dan mampu menentukan faktor produksi yang tepat dengan kendala waktu dan stok (*deposit*). Sedangkan bagi pihak pemilik sumber daya alam hal ini, Negara perlu bersikap mengabaikan terhadap sumber daya mineral, apakah akan mengekstrak sekarang atau pada masa yang akan datang. Jadi sebagai pengambil kebijakan peran Negara

²⁰ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 44

²¹ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 58

sangat menentukan terhadap eksploitasi sumber daya mineral yang tidak semata-mata berorientasi ekonomi tetapi juga perlu mempertimbangkan secara integral baik itu dampak lingkungan, sosial, kesiapan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat lokal²².

Prinsip model Hotelling dapat menjadi salah satu acuan bagi Negara berkembang seperti Indonesia, apakah akan membuka tambang sekarang atau dimasa yang akan datang, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembukaan izin tambang dipengaruhi oleh sejauh mana kesiapan kelembagaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga adat, daya dukung dan daya tampung lingkungan, kecepatan kemampuan lingkungan alam untuk pulih kembali, sosial dan budaya masyarakat setempat²³.

Steer dan Lutz menganalisis ada tiga bentuk penghitungan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu menghitung dampak fisik (ekosistem), dampak terhadap produktifitas dan kesehatan dan dampak moneter. Di tahun 2000 Suparmoko bahkan menambahkan satu lagi bentuk penghitungan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu melalui pendekatan pendapatan. Melalui penghitungan-penghitungan tersebut maka akan diketahui seberapa besar pengurusan pendapatan nasional yang konvensional dengan hasil penghitungan pengurusan sumber daya alam dan degradasi lingkungan²⁴.

Amin et. al. mengatakan implementasi kegiatan konservasi pertambangan sebagai *action plan actual* dari peningkatan nilai tambah pertambangan adalah berkelanjutan manfaat ekonomi dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang di peroleh semenjak perencanaan, selama berlangsungnya kegiatan pertambangan sampai dengan pasca tambang. Peningkatan nilai tambah pertambangan adalah upaya optimalisasi atas pengelolaan proses hulu-hilir kegiatan pertambangan serta pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar kegiatan

²² Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 59

²³ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 59

²⁴ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 63

pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan dapat mencegah dampak pencemaran terhadap daya dukung lingkungan, perubahan perilaku sosial kemasyarakatan serta pertumbuhan sektor ekonomi informal yang tidak terkendali. Untuk itu seyogyanya pengelolaan lingkungan pertambangan mineral di tuangkan dalam suatu kebijakan yang sistematis dan terarah secara berkelanjutan (Weimar & Vining 1987)²⁵.

Internasioanl Council on Mining and Metals telah menyusun sepuluh prinsip pengelolaan pertambangan berkelanjutan (*sustainable mining nabagement*) sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan dan memelihara praktek bisnis yang beretika dan tata kelola perusahaan yang baik (*implement and maintain etichal business practices and sound systems of comporate governance*).
2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (*integrate sustainable development consideration within the corporate decision making process*).
3. Menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lainnya yang bersinggungan dengan aktifitas tambang yang di lakukan (*uphol fundamental human rights and respect cultures, customs and values in dealings with employees and others who are affected by our activities*).
4. Menerapkan strategi manajemen resiko berdasarkan data yang valid dan ilmiah (*implement risk management strategies based on valid data and sound science*).
5. Terus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan (*seek continual improvement of our health safety performance*).

²⁵ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 66

6. Terus meningkatkan kinerja lingkungan (*seek continual improvement of our environmental performance*).
7. Berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas dan pendekatan kegiatan yang terpadu dengan pendekatan perencanaan tata ruang (*contribute to conservation of biodiversity and integrated approaches to land use planning*).
8. Memfasilitasi dan mendorong desain produksi, penggunaan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan produk yang dihasilkan secara bertanggung jawab (*facilitate and encourage responsible product design, use, re-use, recycling and disposal of our products*).
9. Berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di lokasi operasi (*contribute to the sosial, economic, and institutional development of the communities in which we operate*).
10. Mengimplementasikan keterlibatan secara efektif dan transparan, pengaturan dan pelaporan independen dengan para pemangku kepentingan (*implement effective and transparent engagement, communication and independently verified reporting arrangements with our stakeholder*).

Untuk mencapai pengelolaan tambang berkelanjutan maka diperlukan perubahan berpikir dalam memandang sebuah kerusakan lingkungan. Perubahan berpikir yang diperlukan dari berpikir linear menjadi holistik. Pendekatan konvensional sangat dipengaruhi oleh pendekatan linear yaitu pendekatan yang berdasarkan sudut pandang model rasional dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut pendekatan linear suatu masalah disebabkan oleh suatu sebab yang mempengaruhinya, karena itu penyelesaian masalah sangat tergantung pada kemampuan kita mempengaruhi faktor penyebab masalah, misalnya aktifitas tambang

menyebabkan pencemaran sungai, maka solusinya dibuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)²⁶.

Menurut Soelarno aspek penting dalam keberhasilan perencanaan penutupan tambang adalah:

1. Adanya partisipasi stakeholder.

Tujuan dan kriteria untuk menentukan keberhasilan penutupan tambang harus melibatkan stakeholder yang terdiri atas masyarakat setempat, karyawan, pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dengan upaya-upaya yang di arahkan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar area tambang.

2. Tahapan perencanaan yang bersifat dinamis.

Identifikasi isu-isu potensial yang perlu di kelola dikemudian hari harus dilakukan selama kegiatan pertambangan masih berlangsung, yaitu dengan melakukan desain awal penutupan tambang, reklamasi progresif, rencana penutupan lahan sementara dan rencana penutupan tambang final. Reklamasi progresif yang dilakukan selama kegiatan eksploitasi dengan kecepatan yang sama dengan pembukaan lahan.

3. Keberlanjutan ekonomi.

Perlu merumuskan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan pertambangan, selama kegiatan pertambangan berlangsung dan setelah pertambangan berakhir. Diupayakan setelah tambang berakhir tidak terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat sekitar tambang bahkan kalau bisa harus meningkat.

4. Keberlanjutan lingkungan.

²⁶ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 66-68

Apabila suatu daerah akan ditinggalkan setelah sumber daya mineralnya habis di tambang, beberapa persyaratan lingkungan perlu dipenuhi agar memenuhi tujuan dari perencanaan penutupan tambang, yaitu kestabilan ekologi, kimia dan fisik²⁷.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Implementasi

a. Isi kebijakan (*the content of the policy message*)

Kebijakan meliputi:

1. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

2. Manfaat Kebijakan

Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan bahwa dampak positif dan yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

3. Keterlibatan Publik

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat adanya sentuhan dukungan dari publik.

b. Format kebijakan (*the form of the policy message*)

Adapun Format Kebijakan terdiri dari tiga yaitu:

1. Konsistensi Kebijakan (*policy consistency*),

Pemerintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika pemerintah yang diberikan

²⁷ Dr. Arif Zulkifli, S.T.,M.M. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal 88-89

tidak konsisten dan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Frequency serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*).

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

c. Reputasi Aktor (*the reputation of the communication*).

The reputation of the communication terdiri dari: Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter Dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Adapun enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara opolitik.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana sikap penerimaan atau penolakan dari (Agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.²⁸

²⁸ Ibid Hal 26

d. Upaya Mengatasi Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat, perusahaan atau suatu badan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice).²⁹

1) Penambangan Sumber Daya Alam

Penambangan sumber daya alam adalah kekayaan alam yang diambil oleh sekelompok masyarakat atau perusahaan dari alam, yang dimana hasil dari kekayaan alam seperti pertambangan batu, pasir, emas, perak, timah, biji besi, migas.

2) Penambangan Legal

Penambangan legal adalah penambangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau suatu perusahaan yang mendapatkan persetujuan atau mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

3) Penambangan Ilegal

Penambangan ilegal adalah suatu penambangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau suatu badan perusahaan, yang dimana penambangan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah.

Upaya Mengatasi Penambangan Ilegal Persoalan penambangan tanpa izin (peti) kini telah menjadi kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan menjadi sulit diberantas. Upaya yang dilakukan Tim Penanganan Peti dibentuk berdasarkan Keppres 25/2001 dengan menutup paksa belum mampu mengurangi jumlah penambang liar. Dan memang metode seperti ini tidak akan berhasil. Pengalaman China dengan menutup paksa 30.000 penambang

²⁹ <http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf> 10/7/2015. 1:10

ilegal pada 1998 – 2000 tidak berdampak signifikan pada penurunan tingkat kerusakan lingkungan dan kecelakaan kerja, bahkan semakin memperparah kondisi.³⁰

Persoalan penambangan liar tidak hanya di Indonesia, namun juga di beberapa Negara penghasil tambang. Tahun 2002, Organisasi International Mining, Mineral and Sustainable Development (MMSD) menerbitkan laporan *Breaking New Ground*, berisikan standar, pedoman, dan rekomendasi bagi industri pertambangan untuk melakukan penambangan berkelanjutan. Salah satu bagian laporan ini adalah masalah penanganan pertambangan ilegal berdasarkan hasil studi di 18 Negara.³¹

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada didalam pokok permasalahan.

Jadi definisi konseptual merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup dan batasan persoalan, sehubungan dengan definisi konseptual yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah adalah suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, guna untuk kebaikan bersama dan mempunyai tujuan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat bersama.

³⁰ Rudianto Ekawan. *Mengatasi Penambangan Liar*. 2014. Hal 1 24/3/2015. 4:49

³¹ Ibid Hal 2

2. Evaluasi Peraturan Daerah

Evaluasi Peraturan Daerah adalah suatu peraturan atau kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah yang dikaji ulang guna untuk ketepatan dalam menerapkan peraturan itu sendiri terhadap masyarakat maupun daerah.

F. Definisi Operasional

Dalam memudahkan penelitian, maka penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

a. Isi Evaluasi

1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi penambang batu dan pasir ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, diantaranya yaitu:
 - a) Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
 - b) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.
2. Efektifitas
3. Efisiensi
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan
7. Sumberdaya apa saja yang mendukung.
8. Manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan.
9. Kejelasan Kebijakan.
10. Penerimaan Kebijakan.
11. Konsistensi Kebijakan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
2. Keefektifan pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
4. Legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul.

c. Upaya Mengatasi Pertambangan Ilegal

1. Adanya Partisipasi Stakeholder.
2. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis.
3. Keberlanjutan Ekonomi.
4. Keberlanjutan Lingkungan.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³²

³² Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv. Bandung Hal 2

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang tepatnya di bibir sungai Senowo. Peneliti memilih di Desa Keningar karena Desa Keningar merupakan Desa yang tempat terjadinya penambangan ilegal, apalagi lokasi pabrik pemecah batu berdekatan dengan Merapi langsung dan berdekatan dengan Sekolah Dasar, dan Desa Keningar juga yang sudah terkena dampak buruk dan merasakan akibat dari penambangan yang tidak bertanggung jawab itu, dan peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Pemerintah Desa, terhadap PT Hafa Magelang, CV Mitra Karya dan Masyarakat yang melakukan penambangan batu dan pasir ilegal di bibir sungai Senowo.

3. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh Bapak Zaenal Arifin yang menjabat sebagai Bupati Magelang.

³³ Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan* Jogjakarta. Penerbit JKSG

- b. Pemerintah Desa Keningar, yang diwakili oleh Bapak Tarmudji, yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.
- c. PT Hafa Magelang, yang diwakili oleh Bapak Tuhari selaku pimpinan perusahaan.
- d. CV Mitra Karya, yang diwakili oleh Bapak Fatihatul Huda selaku pimpinan perusahaan.
- e. Masyarakat Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh Bapak Mulyono selaku masyarakat Desa Keningar.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral yang diwakili oleh Bapak Nurcahyo selaku kepala Bidang Mineral.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang berasal dari instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dalam hal ini data didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pertambangan, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Keningar dan perusahaan yang terkait penambangan batu dan pasir yaitu PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya, yang berada di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.

Tabel 1.2
Data Primer

No	Data	Sumber Data
1.	Informasi penambangan batu dan pasir di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Pemerintah Desa. c. Dinas Pekerjaan Umum. d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. e. Masyarakat.
2.	Faktor Pendorong dan yang Penghambat Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Pemerintah Desa.
3	Pemahaman PT Hafa dan CV Mitra Karya Terkait Pengelolaan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Hafa Magelang. b. CV Mitra Karya. c. Dinas Pekerjaan Umum. d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
4.	Pemahaman Terkait Peran Masyarakat Magelang Dalam Pengelolaan SDA.	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Kabupaten Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.	Pemahaman Terkait Standard Dalam Pengelolaan SDA di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Masyarakat. e. PT Hafa Magelang. f. CV Mitra Karya.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan perusahaan yang terkait PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya, yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun data sekunder dari penelitian ini meliputi:

Tabel 1.3
Data Sekunder

No	Data	Sumber Data
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.	Data Pengelolaan Pertambangan Batu dan Pasir di Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. Pemerintah Desa.
4.	Data Izin Melakukan Penambangan dan Perluasan Lahan Penambangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang. b. Dinas Pekerjaan Umum. c. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. d. PT Hafa Magelang. e. CV Mitra Karya.
5.	Struktur Organisasi Pemkab Magelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemkab Magelang.

H. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus, maka instrument-instrumen yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.³⁴

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Penelitian yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representative ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.³⁵

Dalam penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada:

- 1) Bupati atau staf Pemerintah Kabupaten Magelang.
- 2) Pemerintah Desa Keningar.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum.
- 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 5) Masyarakat.
- 6) Pimpinan Perusahaan PT Hafa Magelang.
- 7) Pimpinan Perusahaan CV Mitra Karya.

³⁴ Moleong Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 186

³⁵ Ibid

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan, pencatatan dan ingatan. Di dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk dicatat.³⁶

Pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Antara lain:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.³⁷

Dokumentasi yang diperlukan akan diambil di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, CV Mitra Karya dan

³⁶ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv Bandung. Hal 203

³⁷ Ibid. Hal 422

PT Hafa Magelang. Dalam penelitian ini dokumentasi terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi penambangan batu dan pasir secara ilegal yang dilakukan oleh Masyarakat Keningar, CV Mitra Karya dan PT Hafa Magelang.

I. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang sangat signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³⁸

Secara umum proses analisa datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.³⁹

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang dimana data diperoleh dan terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan secara kualitatif. Sehingga fokus dari analisis dari data yang sebenarnya adalah untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa adalah proses perumusan data agar dapat diklasifikasikan sebagai kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi.

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif yang menganalisis data berdasarkan hasil wawancara dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Keningar, PT Hafa Magelang dan CV Mitra Karya. Dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan di gambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategorinya masing-masing untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

³⁸ Moleong Lexy J. 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung Hal 280

³⁹ Ibid Hal 288